

DAMPAK KORUPSI TERHADAP BERBAGAI BIDANG *Korupsi Membuat Program Pencegahan Stunting Gagal*

T. Cesta Latifah
ceсталatifah06@gmail.com
Poltekes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu isu gizi yang berkepanjangan dan tetap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berdasarkan informasi dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, proporsi stunting di seluruh negara mencapai 21,6% (Badan Pusat Statistik & Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Meskipun statistik ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Indonesia masih sangat jauh dari sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan angka 14% pada tahun 2024. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat stunting yang sedang hingga tinggi, yang berpotensi berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta daya saing negara di masa depan.

Pemerintah Indonesia telah membelanjakan sejumlah besar uang untuk inisiatif yang bertujuan untuk mencegah dan menangani masalah stunting. Lewat berbagai pendekatan seperti memberikan suplemen makanan, meningkatkan fungsi posyandu, melakukan intervensi yang sesuai, dan menjalin kerjasama antar sektor, pemerintah mengeluarkan triliunan rupiah setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik & Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa walaupun dana yang cukup besar telah disediakan, jumlah stunting tidak selalu mengalami penurunan yang signifikan. Banyak wilayah melaporkan pengeluaran dana yang tinggi, tetapi kondisi kesehatan anak-anak balita tidak menunjukkan kemajuan yang berarti (World Bank, 2020).

Di balik ketidakberhasilan program ini, terdapat isu signifikan yang sering kali luput dari perhatian: korupsi. Penyalahgunaan dana untuk inisiatif stunting, pemalsuan laporan, pembelian barang-barang palsu, serta pemotongan anggaran untuk bantuan sosial oleh segelintir individu merupakan contoh korupsi yang merusak upaya

peningkatan gizi Masyarakat (Transparency International Indonesia, 2023). Isu ini tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghilangkan kesempatan anak-anak di Indonesia untuk tumbuh secara sehat dan berkembang secara maksimal (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Oleh karena itu, sangat krusial untuk membahas keterkaitan antara korupsi dan ketidakberhasilan program pencegahan stunting dengan serius dan tepat waktu.

2. PENYATAAN OPINI/TESIS

Korupsi merupakan sebuah tantangan besar yang menghalangi keberhasilan inisiatif pencegahan stunting di Indonesia. Ini disebabkan oleh penyalahgunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta memberdayakan masyarakat secara efektif (Reinikka & Svensson, 2004). Semua faktor ini membuat upaya untuk membantu masyarakat menjadi kurang efisien, menurunkan standar pelayanan kesehatan, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah (Peiffer & Rose, 2018). Tanpa adanya upaya yang serius dan terencana untuk mengatasi korupsi dalam sektor kesehatan dan perlindungan sosial, berbagai metode pencegahan stunting tidak akan pernah mencapai hasil yang diharapkan, terlepas dari jumlah dana yang tersedia.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1 Korupsi Anggaran Menyebabkan Distorsi Alokasi Sumber Daya

Program pencegahan stunting sangat dipengaruhi oleh seberapa tepat alokasi dan pelaksanaan anggaran untuk program gizi yang relevan. Tindakan korupsi seperti meningkatkan harga, membeli barang yang tidak asli, atau memotong dana bantuan sosial membuat sumber daya yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita malah digunakan untuk kepentingan pribadi sekelompok oknum. (Transparency International Indonesia, 2023) mengungkapkan bahwa sektor kesehatan dan bantuan sosial merupakan dua area yang paling rawan terhadap tindakan korupsi di tingkat lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2020 juga mengindikasikan bahwa sekitar 20-30% dari total anggaran untuk program gizi di negara-negara berkembang

dapat hilang, yang artinya miliaran rupiah tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya (World Bank, 2020).

Satu contoh nyata mengenai hal ini adalah temuan yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam laporan tersebut, ditemukan berulang kali bahwa terdapat isu dalam pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), seperti pembayaran yang tidak sesuai dan laporan yang tidak akurat dalam berbagai program gizi di beberapa daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Meski program itu secara resmi dinyatakan berhasil, anak-anak tetap menghadapi masalah gizi sebab dana yang disalurkan tidak dimanfaatkan dengan benar.

3.2 Manipulasi Data Menghambat Respons Kebijakan yang Tepat

Salah satu efek terpenting dari praktik korupsi yang seringkali tidak disadari adalah modifikasi informasi dan penipuan laporan program (Reinikka & Svensson, 2004). Dalam hal program penanggulangan stunting, modifikasi ini dapat terjadi melalui pengubahan data berat badan anak-anak usia dini, pelaporan kunjungan posyandu yang tidak akurat, serta pengaturan angka prevalensi stunting di tingkat desa maupun kecamatan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Inti dari semua tindakan ini adalah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan menghindari sanksi administratif, serta memastikan bahwa aliran dana dari pemerintah pusat tetap masuk ke daerah (Olken, 2007).

Keadaan ini melahirkan apa yang diungkapkan oleh Reinikka dan Svensson pada tahun 2004 dalam penelitian terkenal mereka di Uganda yang disebut sebagai 'korupsi informasi' (Reinikka & Svensson, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh oleh para pengambil keputusan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sebagai akibatnya, kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada data yang telah terdistorsi, sehingga tindakan yang diambil tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Di Indonesia, ketika data menunjukkan adanya pengurangan stunting, namun fakta di lapangan tetap sama, maka

perubahan anggaran dan peningkatan program tidak akan dilakukan di wilayah yang benar-benar memerlukannya.

3.3 Korupsi Melemahkan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar

Efektivitas inisiatif untuk menangkal stunting sangat bergantung pada kualitas layanan kesehatan dasar, khususnya di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Tindakan korupsi di bidang ini muncul dengan berbagai cara, termasuk pungutan liar saat memberikan layanan kesehatan kepada ibu dan anak, pengurangan jumlah atau kualitas suplemen gizi yang disuplai kepada masyarakat, serta ketidakhadiran petugas kesehatan yang sering kali disebabkan oleh tradisi yang membolehkan pelanggaran etika. Berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, tindakan korupsi dalam sektor kesehatan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat akses dan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat kurang mampu semakin sulit dan rendah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Peiffer dan Rose pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dengan isu korupsi di layanan publik berakibat pada banyaknya orang yang mengurangi pemanfaatan layanan kesehatan yang ditujukan untuk pencegahan (Peiffer & Rose, 2018). Dengan kata lain, apabila seorang ibu hamil atau keluarga yang memiliki anak kecil mendengar mengenai adanya biaya tidak resmi di posyandu atau puskesmas, mereka cenderung memilih untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini berdampak pada penurunan signifikan dalam jumlah partisipan pada program gizi dan kesehatan untuk ibu serta anak.

3.4 Korupsi Memperlemah Koordinasi Lintas Sektor

Program pencegahan stunting di Indonesia dirancang sebagai inisiatif yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanian, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan sosial. Isu korupsi yang muncul di berbagai lini pemerintahan menyebabkan ketidakharmonisan serta

pemborosan yang merugikan (Transparency International Indonesia, 2023). Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan koordinasi, pelatihan, dan peningkatan keterampilan sering kali disalahgunakan, sehingga pelaksanaan program menjadi terhambat. Setiap sektor biasanya hanya menitikberatkan pada pengelolaan anggaran tanpa memastikan adanya dampak positif yang nyata bagi individu yang menjadi sasaran program.

(Stifel & Alderman, 2006) menyatakan bahwa ketidakadanya kolaborasi antara program akibat korupsi dan manajemen yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab utama mengapa program gizi di negara-negara berkembang sering gagal. Di Indonesia, situasi ini menjadi lebih parah karena adanya program yang tumpang tindih di antara berbagai kementerian, yang menciptakan lebih banyak peluang untuk terjadinya mark-up dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Analisis mengenai hubungan antara korupsi dan isu program stunting memiliki signifikansi yang besar dan berperan penting dalam kebijakan publik di Indonesia. Pertama-tama, berkaitan dengan kebijakan kesehatan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekadar bergantung pada metode teknis seperti meningkatkan distribusi makanan tambahan, memperbaiki pelatihan untuk kader posyandu, atau merancang menu makanan yang berbasis bahan lokal tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa adanya peningkatan dalam manajemen dan penerapan integritas yang berkelanjutan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023; World Bank, 2020).

Kedua, dalam konteks tanggung jawab publik, sangat krusial bagi masyarakat, media, dan lembaga pemantau independen untuk memiliki lebih banyak peluang dalam mengawasi penggunaan anggaran program pengentasan stunting. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terbukti mampu mengurangi penyimpangan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan publik, seperti yang telah diungkapkan dalam berbagai riset di negara-negara yang sedang berkembang (Olken, 2007). Sarana pengaduan yang mudah diakses, perlindungan bagi pelapor, serta transparansi informasi anggaran adalah aspek-aspek yang perlu diperkuat.

Ketiga, dari perspektif hukum dan implementasi, usaha untuk menanggulangi korupsi dalam sektor gizi dan perlindungan sosial perlu menjadi fokus utama bagi KPK, jaksa, serta lembaga penegak hukum lainnya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Penegakan sanksi yang berat terhadap individu yang terlibat dalam korupsi berkenaan dengan dana penanganan stunting yang secara langsung merugikan kesehatan anak-anak harus didukung dengan regulasi yang lebih ketat, termasuk penambahan elemen yang memberatkan dalam tuntutan kasus korupsi yang berpengaruh pada kesehatan Masyarakat (Transparency International Indonesia, 2023).

Keempat, dari segi pendidikan, diperlukan penelitian tambahan yang mencakup berbagai disiplin ilmu untuk secara akurat menghitung seberapa besar dana yang bocor terkait isu stunting dan pengaruhnya terhadap indikator kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia (World Bank, 2020). Studi yang memanfaatkan data administrasi yang mengaitkan Indeks Persepsi Korupsi di suatu lokasi dengan prevalensi stunting di wilayah tersebut dapat menyajikan bukti yang lebih meyakinkan untuk mendukung kebijakan (Olken, 2007).

5. PENUTUP

Korupsi bukan sekadar isu tentang finansial negara; ini merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi mendatang. Setiap penyalahgunaan dana bantuan untuk mengatasi stunting berarti ada seorang anak yang tidak memperoleh nutrisi yang layak, seorang ibu hamil yang kekurangan suplemen yang diperlukan, dan sebuah keluarga yang tertekan secara ekonomi tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang memadai. Selama praktik korupsi masih mengganggu pengelolaan program kesehatan dan gizi, Indonesia akan tetap menghadapi kesulitan dalam mencapai sasaran pengurangan stunting, terlepas dari seberapa banyak anggaran yang tersedia.

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan, terdapat beberapa rekomendasi krusial yang perlu segera diimplementasikan. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan yang memanfaatkan teknologi dengan mendigitalisasikan proses distribusi bantuan gizi serta mengintegrasikan data dari berbagai kementerian untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi beserta lembaga penegak hukum perlu menjadikan pengawasan anggaran untuk isu stunting

sebagai fokus utama, dengan melakukan tindakan hukum yang mampu memberikan efek jera. Selain itu, diperlukan transparansi dalam penganggaran dengan mewajibkan seluruh daerah untuk mengungkapkan rincian anggaran program stunting secara daring agar dapat diakses oleh publik. Keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan media dalam mengawasi program harus didorong dan dilindungi oleh peraturan hukum.

Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi masa kini. Melindungi anak-anak dari stunting adalah investasi paling efisien untuk negara, dan hal ini hanya dapat terwujud jika upaya untuk mengatasi korupsi dilakukan dengan kesungguhan, strategi yang matang, dan tindakan yang tegas.

6. REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik & Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Kajian Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan*. Jakarta: KPK.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249. <https://doi.org/10.1086/517935>
- Peiffer, C., & Rose, R. (2018). Why are the poor more vulnerable to bribery in Africa? The institutional effects of services. *Journal of Development Studies*, 54(1), 18–33.
- Reinikka, R., & Svensson, J. (2004). Local capture: Evidence from a central government transfer program in Uganda. *Quarterly Journal of Economics*, 119(2), 679–705.
- Stifel, D., & Alderman, H. (2006). The 'glass of milk' subsidy program and malnutrition in Peru. *World Bank Economic Review*, 20(3), 421–448.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- World Bank. (2020). *Leakages in Public Spending on Nutrition Programs: A Cross-Country Analysis*. Washington, DC: World Bank Group.